

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412 Sekayu Website: http://disdikbud.mubakab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR: 420/182/Korwil.KLS/II/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang

- Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat perihal pendidikan di masyarakat
- Bahwa dalam rangka penertiban Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) bagi sekolah yang B. memperbaharui No. SK Izin Operasional dikarenakan data awal tidak ada.
- Bahwa dalam pertimbangan diatas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan C. tentang SK Izin Operasional.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 1. Nasional:
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SK IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 7 LAIS, ALAMAT JL. PTPN VII TASA XI DESA TANJUNG AGUNG UTARA KECAMATAN LAIS.

Pertama

Menyetujui mulai sejak tanggal diterbitkan pembaharuan SK Izin Operasional Sekolah ditetapkan

sebagai syarat untuk pembaharuan Sertifikat NPSN;

Kedua

Bila dalam Operasional Sekolah terdapat kendala disebabkan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personil yaitu sekolah tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah masing-masing;

Ketiga

Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Keempat

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEKAYU

: 24 FEBRUARI 2025 Pada tanggal

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ATEN MUSI BANYUASIN

DIKBUD

OTDIKA Ren